

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin**



**Dinas Perindustrian**  
**Kabupaten Tapin**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran. Meskipun demikian Dinas Perindustrian tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rantau, 13 Februari Tahun 2026

  
**Kepala Dinas**  
**Herliwansyah, S.E., M.M.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 198001102008031002

## DAFTAR ISI

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                            | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                             | <b>3</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                         | <b>5</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                              | 5         |
| 1.2 Penjelasan Umum Organisasi .....                                                                  | 6         |
| 1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....                                                        | 6         |
| 1.2.2 Anggaran .....                                                                                  | 8         |
| 1.3 Dasar Hukum .....                                                                                 | 8         |
| 1.4 Sistematika Laporan Kinerja .....                                                                 | 9         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                                                               | <b>11</b> |
| 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....                                                         | 11        |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                                                               | 19        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                                            | <b>27</b> |
| 3.1 Capaian Kinerja .....                                                                             | 27        |
| 3.1.1 Sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan,<br>Koperasi dan UMKM ..... | 30        |
| 3.1.2 Sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri .....                              | 34        |
| 3.1.3 Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi. ....                                               | 39        |
| 3.1.4 Sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro .....                                            | 43        |
| 3.1.5 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .....                               | 46        |
| 3.2 Efisiensi Anggaran .....                                                                          | 55        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                           | <b>60</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.1</b> Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025                                                 | 8  |
| <b>Tabel 2.1</b> Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis | 11 |
| <b>Tabel 2.2</b> Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025                                             | 14 |
| <b>Tabel 2.3</b> Perjanjian Kinerja Tahun Dinas Perindustrian 2025                                               | 19 |
| <b>Tabel 2.4</b> Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025                                 | 20 |
| <b>Tabel 3.1</b> Pengkategorian Capaian Kinerja                                                                  | 28 |
| <b>Tabel 3.2</b> Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025                                                      | 28 |
| <b>Tabel 3.3</b> Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis 1                                 | 31 |
| <b>Tabel 3.4</b> Perbandingan Capaian Kinerja                                                                    | 31 |
| <b>Tabel 3.5</b> Kemajuan Capaian Sasaran Strategis                                                              | 32 |
| <b>Tabel 3.6</b> Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota                            | 33 |
| <b>Tabel 3.7</b> Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis 2                                 | 36 |
| <b>Tabel 3.8</b> Daftar Koperasi yang Sisa Hasil Usahnya Meningkatkan                                            | 36 |
| <b>Tabel 3.9</b> Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis 3                                 | 38 |
| <b>Tabel 3.10</b> Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis 4                                | 41 |
| <b>Tabel 3.11</b> Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran                                                    | 41 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1.1</b> Struktur Organisasi                                                                | 8  |
| <b>Gambar 1.2</b> Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024                                             | 42 |
| <b>Gambar 1.3</b> Kategori Tingkat IP-ASN                                                            | 47 |
| <b>Gambar 1.4</b> Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 | 48 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja atas tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## 1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin tahun 2025 sebagai berikut:

### 1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian dipertegas kembali di dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi. Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Adapun uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

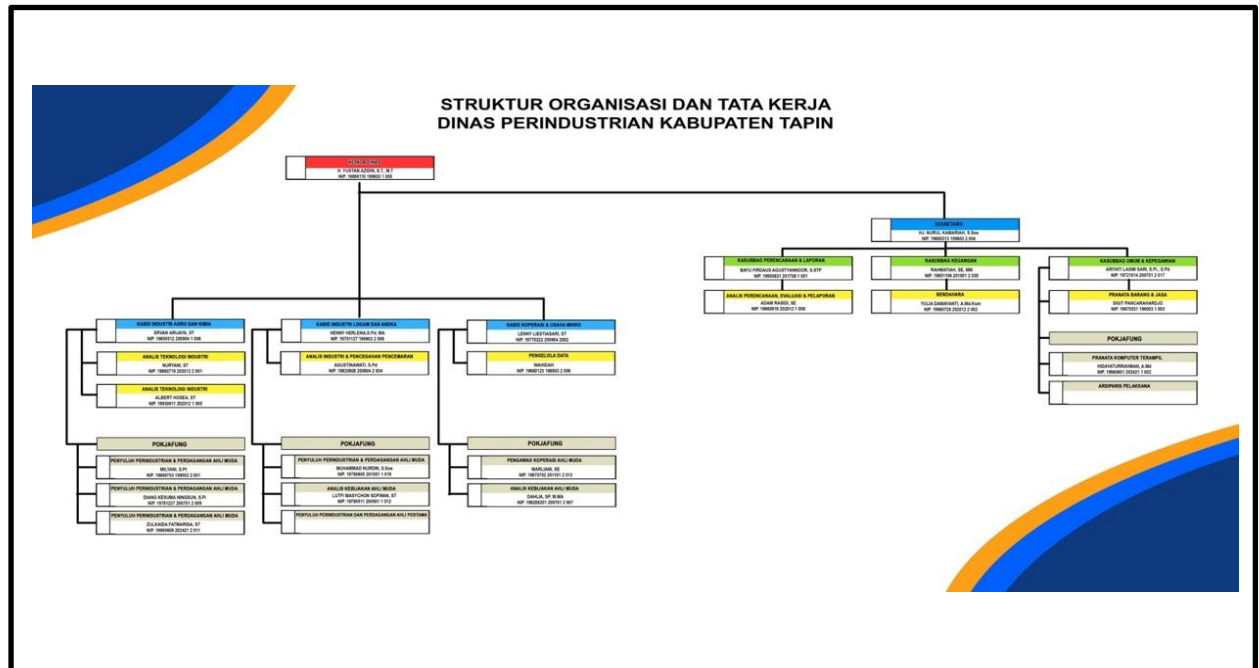
- a) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten;
- c) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang industri kerajinan dan aneka;
- d) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil dan menengah;
- e) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
- f) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;
- h) Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perindustrian mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b) Penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten;
- c) Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang industri kerajinan dan aneka;
- d) Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil dan menengah;
- e) Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
- h) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, struktur organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian**



### 1.2.2 Anggaran

Besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 sebesar Rp.9.317.317.921,00. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin:

**Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025**

| Sumber | Tahun      | Jumlah              |
|--------|------------|---------------------|
| (1)    | (2)        | (3)                 |
| APBD   | Tahun 2024 | Rp.9.338.228.859,00 |
| APBD   | Tahun 2025 | Rp.9.317.317.921,00 |

Sumber: *Sub Bagian Keuangan, 2025*

### 1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

##### **BAB II                    PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III                    AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

###### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN**

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah meningkatnya pembangunan ekonomi sektor industri pengolahan, koperasi dan UMKM di Kabupaten Tapin.

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin tahun 2025-2029, maka ditetapkanlah sasaran strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan industri;
- 2) Meningkatnya produktivitas koperasi;
- 3) Meningkatnya produktivitas UMKM;
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; dan
- 5) Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis**

| No  | Tujuan                                                                         | Sasaran                                                | Indikator Kinerja                                                              | Target Kinerja Pada Tahun |       |       |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                |                                                        |                                                                                | 2025                      | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| (1) | (2)                                                                            | (3)                                                    | (4)                                                                            | (5)                       | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |
| 1   | Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM | 1 Meningkatkan Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPI K | 100                       | 100   | 100   | 100   | 100   |
|     |                                                                                | 2 Meningkatnya                                         | Persentase Koperasi                                                            | 55                        | 57.14 | 59.09 | 60.87 | 62.50 |

| No  | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja                                   | Target Kinerja Pada Tahun                            |       |       |       |       |       |
|-----|--------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |        |         |                                                     | 2025                                                 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |       |
| (1) | (2)    | (3)     |                                                     | (4)                                                  | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |
|     |        |         | Produktivitas Koperasi                              | yang SHU nya Meningkat                               |       |       |       |       |       |
|     |        | 3       | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro              | Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan      | 14.62 | 14.82 | 15,00 | 15.20 | 15.40 |
|     |        | 4       | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                         | 84    | 84.05 | 84.10 | 84.15 | 84.20 |
|     |        | 5       | Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah   | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah | 80    | 80.10 | 80.20 | 80.30 | 80.40 |

*Sumber: Renstra Dinas Perindustrian Periode 2022 - 2026*

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin di atas akan dicapai melalui 8 (delapan) program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja/bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun 8 (delapan) program tersebut adalah sebagai berikut:

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;

1. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
3. Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi;
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

6. Program Pengembangan UMKM; dan
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025**

| No  | Tujuan/ Sasaran Strategis                            | Indikator Kinerja                                                               | Satuan | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      |                                                                                 |        | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formulasi/ Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Data                                                             |
| (1) | (2)                                                  | (3)                                                                             | (4)    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (7)                                                                     |
| 1   | Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri | 1 Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK | %      | Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIK yang RPIK. ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka | Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen RPIK yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut, dan setiap sasaran memiliki bobot 25%. Target pada dokumen RPIK terdiri dari:<br>1. Pertumbuhan sektor industri (%)<br>2. Kontribusi industri terhadap PDRB (%)<br>3. Nilai produksi industri (juta rupiah)<br>4. Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)<br><br>$\Sigma$ Jumlah akumulasi realisasi kinerja dari 4 indikator<br><br>sasaran pembangunan industri dalam | 1. Bidang Industri Agro dan Kimia<br>2. Bidang Industri Logam dan Aneka |

| No  | Tujuan/ Sasaran Strategis              | Indikator Kinerja |                                                 | Satuan | Penjelasan                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                 |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                        |                   |                                                 |        | Definisi Operasional                                                                                                                                                                | Formulasi/ Rumus Perhitungan                                                                | Sumber Data                     |
| (1) | (2)                                    | (3)               |                                                 | (4)    | (5)                                                                                                                                                                                 | (6)                                                                                         | (7)                             |
|     |                                        |                   |                                                 |        | waktu 20 tahun dalam bentuk Perda                                                                                                                                                   | $\frac{RPIK}{\times 25\%}$<br><i>4 indikator sasaran pembangunan industri</i>               |                                 |
| 2   | Meningkatnya Produktivitas Koperasi    | 1                 | Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat      | %      | Sisa Hasil Usaha atau SHU Koperasi adalah selisih dari kas masuk sebagai sumber pembiayaan dikurangi kas keluar untuk membiayai kebutuhan organisasi dan biaya operasional koperasi | $\frac{\sum Koperasi\ Sehat\ yang\ SHU\ nya\ Meningkat}{\sum Koperasi\ Sehat} \times 100\%$ | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro |
| 3   | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro | 1                 | Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan | %      | Peningkatan omzet usaha mikro binaan adalah                                                                                                                                         | $\sum Omzet\ Usaha\ Mikro\ Setelah\ Dibina$                                                 | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro |

| No  | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |  | Satuan | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |             |
|-----|---------------------------|-------------------|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                           |                   |  |        | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                              | Formulasi/ Rumus Perhitungan                                                                      | Sumber Data |
| (1) | (2)                       | (3)               |  | (4)    | (5)                                                                                                                                                                                                                               | (6)                                                                                               | (7)         |
|     |                           |                   |  |        | perbandingan antara total omzet setelah menerima program pembinaan dengan total omzet sebelum pembinaan, yang menggambarkan tingkat pertumbuhan kinerja usaha mikro sebagai dampak dari intervensi atau fasilitasi yang diberikan | $100\% \frac{\sum \text{Omzet Usaha Mikro Sebelum Dibina}}{\text{Total Omzet Sebelum Pembinaan}}$ |             |

| No  | Tujuan/ Sasaran Strategis                           | Indikator Kinerja                                         | Satuan | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                                     |                                                           |        | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formulasi/ Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                                               | Sumber Data                |
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                       | (4)    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (6)                                                                                                                                                                                                                        | (7)                        |
| 4   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1<br>Nilai SAKIP Perangkat Daerah                         | poin   | Akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah tingkat pertanggungjawaban perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran yang didasarkan pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta pencapaian hasil sesuai dengan perencanaan kinerja, yang diukur melalui dokumen laporan kinerja, audit internal/eksternal, dan kepatuhan terhadap indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bobot Maksimal Komponen yang dinilai : Perencanaan Kinerja = 30, Pengukuran Kinerja = 30, Pelaporan Kinerja = 15 dan Evaluasi Internal = 25 | <div>Komponen Yang Dinilai</div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> <li>3. Pelaporan Kinerja</li> <li>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</li> </ol> | LHE AKIP                   |
| 5   | Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah   | 1<br>Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah | poin   | Rumus pengukuran Indeks profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Hasil penilaian berdasarkan hasil penilaian yang diunggah pada Aplikasi Padaringan Tapin<br><br>IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diukur berdasarkan angka rata-rata dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN                                                                                                                          | Padaringan Kabupaten Tapin |

| No  | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |  | Satuan | Penjelasan                                                                                                          |                              |             |
|-----|---------------------------|-------------------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                           |                   |  |        | Definisi Operasional                                                                                                | Formulasi/ Rumus Perhitungan | Sumber Data |
| (1) | (2)                       | (3)               |  | (4)    | (5)                                                                                                                 | (6)                          | (7)         |
|     |                           |                   |  |        | ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. |                              |             |

*Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Tahun 2025*

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan kinerja, diperlukan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan disertai dengan indikator kinerjanya. Dengan Perjanjian Kinerja (PK) tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Perindustrian Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2025**

| No. | Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja                                                             | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                            | (3)                                                                           | (4)    |
| 1   | Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM | LPE Kategori Industri Pengolahan                                              | 5.1    |
| 1-1 | Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri                           | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK | 100    |
| 1-2 | Meningkatnya Produktivitas Koperasi                                            | Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat                                    | 55     |
| 1-3 | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro                                         | Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan                               | 14.62  |
| 1-4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                            | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                  | 84     |
| 1-5 | Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah                              | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah                          | 80     |

*Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2025*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perindustrian:

**Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian Tahun 2025**

| No.      | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                 | Target       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (1)      | (2)                                                                                                                                              | (3)                                                                                               | (4)          |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                                               | <b>Persentase Koperasi Aktif</b>                                                                  | <b>51.97</b> |
| 1-1      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Koperasi yang Telah Melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)                           | 25.32        |
|          |                                                                                                                                                  | Persentase Laporan Monitoring Koperasi Aktif yang Ditindaklanjuti                                 | 100          |
|          |                                                                                                                                                  | Persentase Koperasi Aktif yang Diberikan Dukungan Fasilitas Bimbingan Pengawasan Koperasi         | 19.74        |
| 1-1-1    | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                       | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                         | 15           |
|          |                                                                                                                                                  | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Melalui Sosialisasi RAT | 15           |
|          |                                                                                                                                                  | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Monitoring                                                         | 79           |
| <b>2</b> | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>                                                                                              | <b>Persentase SDM Koperasi yang Mampu Menerapkan Manajemen Koperasi</b>                           | <b>100</b>   |
| 2-1      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                          | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan                                   | 100          |
| 2-1-1    | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                | 135          |
| <b>3</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>                                                                                            | <b>Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas</b>                                          | <b>25.31</b> |

|       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3-1   | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembinaan dan Pendampingan                                   | 100        |
| 3-1-1 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | 79         |
|       |                                                                                                                                                                  | Jumlah SDM Koperasi yang Diberikan Bimbingan Manajemen Koperasi                                                    | 25         |
| 4     | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                  | <b>Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal</b>                                             | <b>0</b>   |
| 4-1   | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Usaha Mikro yang Mendapatkan Pendampingan Perizinan                                                     | 100        |
|       |                                                                                                                                                                  | Persentase Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual                                         | 100        |
|       |                                                                                                                                                                  | Persentase Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Halal                                                | 100        |
|       |                                                                                                                                                                  | Persentase Usaha Mikro yang Menerima Pembinaan dan Pendampingan                                                    | 100        |
| 5     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                               | <b>Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti</b>                                                    | <b>100</b> |
| 5-1   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan                              | 100        |
|       |                                                                                                                                                                  | Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)           | 100        |
| 5-1-1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 25         |
| 5-1-2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1          |
| 5-1-3 | Koordinasi dan Penyusunan                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/                                                                                   | 2          |

|       | Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD                   | Triwulanan/ Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5-2   | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                         | Persentase kelulusan ASN Perangkat<br>Daerah yang mengikuti Peningkatan<br>kapasitas                                       | 100 |
| 5-2-1 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                   | 1   |
| 5-2-2 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                                                          | 1   |
| 5-2-3 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor<br>yang Disediakan                                                                      | 1   |
| 5-2-4 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang Disediakan                                                             | 1   |
| 5-2-5 | Penyediaan Bahan/Material                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang<br>Disediakan                                                                             | 1   |
| 5-2-6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                                                | 1   |
| 5-2-7 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                     | 12  |
| 5-3   | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah        | Persentase aset daerah yang tercatat<br>sesuai dengan realisasi fisik dan<br>keuangan                                      | 100 |
| 5-3-1 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan                                                                 | 12  |
| 5-4   | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                    | Persentase sarana dan prasarana yang di<br>manfaatkan SKPD                                                                 | 100 |
| 5-4-1 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                               | 12  |
| 5-4-2 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                 | 12  |
| 5-5   | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | Persentase Barang Milik Daerah (BMD)<br>dalam kondisi baik                                                                 | 80  |
| 5-5-1 | Penyediaan Jasa                                                               | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas                                                                                          | 1   |

|       |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                   |             |
| 5-5-2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                     | 20          |
| 6     | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                                               | <b>Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Agro dan Kimia</b>                                                                              | <b>0.66</b> |
|       |                                                                                                                   | <b>Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Logam dan Aneka</b>                                                                             | <b>4.22</b> |
|       |                                                                                                                   | <b>Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Agro dan Kimia</b>                                                               | <b>3.01</b> |
|       |                                                                                                                   | <b>Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Logam dan Aneka</b>                                                              | <b>1.01</b> |
|       |                                                                                                                   | <b>Persentase Produk IKM yang Dihasilkan Melalui Fasilitas Produksi</b>                                                                | <b>1.1</b>  |
| 6-1   | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                               | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri                                                          | 100         |
|       |                                                                                                                   | Persentase Peningkatan Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan                                                                        | 45.45       |
|       |                                                                                                                   | Persentase Peningkatan Bahan Baku IKM Berbasis Agro dan Kimia                                                                          | 0.11        |
|       |                                                                                                                   | Persentase Peningkatan Bahan Baku IKM Berbasis Logam dan Aneka                                                                         | 0.63        |
|       |                                                                                                                   | Persentase Peningkatan Tenaga Kerja IKM Berbasis Agro dan Kimia                                                                        | 0.66        |
|       |                                                                                                                   | Persentase Peningkatan Tenaga Kerja IKM Berbasis Logam dan Aneka                                                                       | 2.95        |
| 6-1-1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 13          |
| 6-1-2 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        | 12          |
| 6-1-3 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | 12          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6-1-4 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10         |
| 7     | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin Usaha Industri yang Ditindaklanjuti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100</b> |
| 7-1   | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                          | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100        |
| 7-1-1 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 4          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Standar Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          |
| 8     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100</b> |
| 8-1   | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | Persentase Peningkatan Akses SIINas oleh IKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.99      |
| 8-1-1 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4          |

|       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data IKM Melalui SIINas                                                                                      | 4            |
| 8-1-2 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                                                       | 1            |
|       |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data IKM Melalui SIINas                                                                                                  | 1            |
| 8-1-3 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas     | 1            |
|       |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan IKM dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                            | 1            |
| 9     | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                                                            | <b>Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)</b>                                                                                                                        | <b>25.2</b>  |
|       |                                                                                                                                               | <b>Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)</b>                                                                                                                       | <b>27</b>    |
|       |                                                                                                                                               | <b>Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)</b>                                                                                                                         | <b>11.55</b> |
|       |                                                                                                                                               | <b>Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)</b>                                                                                                                          | <b>20.25</b> |
| 9-1   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                              | Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti                                                                                                                  | 100          |
|       |                                                                                                                                               | Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti                                                                              | 100          |
| 9-1-1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 12           |
| 9-1-2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7            |
| 10    | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>UMKM</b>                                                                                                      | <b>Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan</b>                                                                                                                 | <b>14.63</b> |
| 10-1  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha                                                                             | Pertumbuhan Wirausaha                                                                                                                                                  | 37.5         |

|        |                                                                                     |                                                                                                                                       |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | Menjadi Usaha Kecil                                                                 |                                                                                                                                       |     |
| 10-1-1 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 155 |
|        |                                                                                     | Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Dasar Kewirausahaan                                                                        | 155 |

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian Tahun 2025*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat, untuk melaksanakan kewajiban tersebut diwajibkan untuk berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Perindustrian.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur kinerja, ditetapkan predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1  | Sangat Tinggi         | $91 \leq 100$       |
| 2  | Tinggi                | $76 \leq 90$        |
| 3  | Sedang                | $66 \leq 75$        |
| 4  | Rendah                | $51 \leq 65$        |
| 5  | Sangat Rendah         | $\leq 50$           |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan kepada Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dengan Bupati Tapin pada tahun 2025. Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

| No. | Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja                                                        | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori      | Sumber Data                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|
| (1) | (2)                                                                            | (3)                                                                      | (4)    | (5)       | (6)       | (7)           | (8)                           |
| 1   | Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM | LPE Kategori Industri Pengolahan                                         | 5.1    | 8.15      | 159,80    | Sangat Tinggi | BPS                           |
| 2   | Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri                           | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam | 100    | 106.86    | 106,86    | Sangat Tinggi | Bidang Logam dan Aneka Bidang |

| No. | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                                    | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori      | Sumber Data                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                  | (4)    | (5)       | (6)       | (7)           | (8)                                            |
|     |                                                     | RPIK                                                 |        |           |           |               | Agro dan Kimia                                 |
| 3   | Meningkatnya Produktivitas Koperasi                 | Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat           | 55     | 42,86     | 77,92     | Tinggi        | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro                |
| 4   | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro              | Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan      | 14.62  | 14.62     | 100,00    | Sangat Tinggi | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro                |
| 5   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                         | 84     | 78.35     | 93,27     | Sangat Tinggi | LHE AKIP                                       |
| 6   | Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah   | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah | 80     | 87,71     | 109,63    | Sangat Tinggi | Padaringan Kabupaten Tapin dan My ASN (BKPSDM) |

Sumber: Dinas Perindustrian Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2025, secara umum kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menunjukkan hasil yang sangat baik, hal ini terlihat dari 6 (enam) sasaran yang diperjanjikan mendapatkan kategori capaian 5 (lima) sasaran dengan kategori sangat tinggi dan satu sasaran dengan kategori tinggi.

### 3.1.1 Sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM dengan Indikator LPE Kategori Industri Pengolahan berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 8,15% dari target 5,10% dengan capaiannya sebesar 159,80% atau dengan kategori sangat tinggi sebagaimana uraian berikut:

| No. | Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja                | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| (1) | (2)                                                                            | (3)                              | (4)    | (5)       | (6)       | (7)           |
| 1   | Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM | LPE Kategori Industri Pengolahan | 5.10   | 8.15      | 159,80    | Sangat Tinggi |

Sumber data: BPS Kabupaten Tapin

Berdasarkan data diatas, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM dengan Indikator LPE Kategori Industri Pengolahan mendapatkan capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 159,80%, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin memperoleh kategori capaian Sangat Tinggi.

Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis                                                              | Indikator                        | Meta Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                            | (3)                              | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM | LPE Kategori Industri Pengolahan | <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>PDB_t</math> = Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan pada tahun/periode ke-t</li> <li><math>PDB_{t-1}</math> = PDB sektor industri pengolahan pada tahun/periode sebelumnya</li> </ul> $\text{Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ |

Berikut capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM dengan Indikator LPE Kategori Industri Pengolahan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya**

| No  | Tujuan/<br>Sasaran                                                             | Indikator<br>Kinerja             | Tahun<br>(2022) | Tahun<br>(2023) | Tahun<br>(2024) | Tahun (2025) |           |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
|     |                                                                                |                                  | Realiasi        | Realisasi       | Realisasi       | Target       | Realisasi | %<br>Capaian |
| (1) | (2)                                                                            | (3)                              | (4)             | (5)             | (6)             | (7)          | (8)       | (9)          |
| 1   | Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM | LPE Kategori Industri Pengolahan | -               | -               | 4,23            | 5.10         | 8.15      | 159,80       |

Capaian Sasaran Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM sebagaimana tabel diatas dapat dilihat pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2024 sebesar 4,23 dan pada tahun

2025 meningkat menjadi 8,15 yang dalam hal ini dapat terlihat bahwa pencapaian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Selanjutnya capaian Sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM dilihat dari hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| No. | Tujuan/<br>Sasaran                                                                         | Indikator Kinerja                   | Realisasi Kinerja<br>Tahun 2025 | Target Akhir<br>Rencana<br>Strategis | Tingkat<br>Kemajuan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| (1) | (2)                                                                                        | (3)                                 | (4)                             | (5)                                  | (6) = 4/5*100       |
| 1   | Meningkatnya<br>Pembangunan<br>Ekonomi Sektor<br>Industri Pengolahan,<br>Koperasi dan UMKM | LPE Kategori Industri<br>Pengolahan | 8.15                            | 5.34                                 | 152,62              |

Berdasarkan data diatas, sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM dengan LPE Kategori Industri Pengolahan dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 8,15 dengan target akhir pada rencana strategis yaitu pada tahun 2026 sebesar 5,34 dengan tingkat kemajuan sebesar 152,62%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi tingkat Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM dengan LPE Kategori Industri Pengolahan telah melebihi dari target yang ditetapkan pada akhir rencana strategis. Capaian ini mencerminkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sangat baik.

Selanjutnya untuk sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM dengan LPE Kategori Industri Pengolahan dilihat dari Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar provinsi diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi**

| No. | Tujuan/ Sasaran                                                                | Indikator Kinerja                | Realisasi Tahun 2025 | Standar Provinsi                                            | % Capaian    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| (1) | (2)                                                                            | (3)                              | (4)                  | (5)                                                         | (6) =4/5*100 |
| 1   | Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM | LPE Kategori Industri Pengolahan | 8.15                 | 11,68-12,46<br>(Target Prov. Kalsel di Perubahan RKPD 2026) | 69,77        |

Berdasarkan data diatas, capaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin walaupun capaian sudah sangat baik, namun jika dibandingkan dengan capaian Provinsi masih berada di bawah capaian Provinsi Kalsel. Hal ini disebabkan adanya perbedaan target yang telah ditetapkan antara Kabupaten dengan Provinsi. Dengan demikian data capaian ini dapat dijadikan bahan perbandingan atas kinerja yang diperoleh dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan target kedepan, sekaligus dijadikan pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja lebih baik kedepannya.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM dengan LPE Kategori Industri Pengolahan yang telah dilakukan, disajikan dalam uraian sebagai berikut:

Keberhasilan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin terhadap sasaran Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM dengan indikator LPE Kategori Industri Pengolahan ini didukung oleh beberapa program yang tepat untuk mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa program tersebut sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini dicapai dengan melakukan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.837.777.583,00 dan realisasi sebesar Rp.696.142.364,00 atau 83,09%.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini dicapai dengan melakukan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.89.945.098,00 dan realisasi sebesar Rp.75.298.450,00 atau 83,71%.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini dicapai dengan melakukan Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.119.789.934,00 dan realisasi sebesar Rp.107.441.635,00 atau 89,69%.

### 3.1.2 Sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri dengan indikator Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang ditetapkan dalam RPIK berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 106,86% dari target 100% dengan capaiannya sebesar 106.86% atau dengan kategori sangat tinggi sebagaimana uraian berikut:

| No. | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja                                                             | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori      | Sumber Data                                         |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                  | (3)                                                                           | (4)    | (5)       | (6)       | (7)           | (8)                                                 |
| 2   | Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK | 100    | 106.86    | 106,86    | Sangat Tinggi | Bidang Logam dan Aneka<br><br>Bidang Agro dan Kimia |

Berdasarkan data diatas, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri dengan Indikator Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang

Ditetapkan dalam RPIK mendapatkan capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 106,86%, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin memperoleh kategori capaian Sangat Tinggi.

Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

| No . | Sasaran Strategis                                    | Indikator                                                                     | Meta Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)                                                  | (3)                                                                           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2    | Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK | <p>Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen RPIK yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut, dan setiap sasaran memiliki bobot 25%. Target pada dokumen RPIK terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan sektor industri (%)</li> <li>2. Kontribusi industri terhadap PDRB (%)</li> <li>3. Nilai produksi industri (juta rupiah)</li> <li>4. Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)</li> </ol> <p><math>\sum</math> Jumlah akumulasi realisasi kinerja dari 4 indikator sasaran pembangunan industri dalam RPIK</p> <hr/> <p><math>\times 25\%</math></p> <p>4 indikator sasaran pembangunan industri</p> |

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri dengan Indikator Persentase Pencapaian Sasaran

Pembangunan Industri yang ditetapkan dalam RPIK pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya**

| No  | Tujuan/<br>Sasaran                                   | Indikator<br>Kinerja                                                          | Tahun<br>(2022) | Tahun<br>(2023) | Tahun<br>(2024) | Tahun (2025) |           |              |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
|     |                                                      |                                                                               | Realiasi        | Realisasi       | Realisasi       | Target       | Realisasi | %<br>Capaian |
| (1) | (2)                                                  | (3)                                                                           | (4)             | (5)             | (6)             | (7)          | (8)       | (9)          |
| 2   | Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK | -               | -               | 100             | 100          | 106.86    | 106,86       |

Capaian sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri sebagaimana tabel diatas dapat dilihat pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2024 sebesar 100% dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 106,86% yang dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian periode 2025-2029 untuk capaian sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| No. | Tujuan/<br>Sasaran              | Indikator Kinerja                         | Realisasi Kinerja<br>Tahun 2025 | Target Akhir<br>Rencana<br>Strategis | Tingkat<br>Kemajuan |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| (1) | (2)                             | (3)                                       | (4)                             | (5)                                  | (6) =4/5*100        |
| 2   | Meningkatnya Pencapaian Sasaran | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan | 106.86                          | 100                                  | 106,86              |

| No. | Tujuan/<br>Sasaran      | Indikator Kinerja                      | Realisasi Kinerja<br>Tahun 2025 | Target Akhir<br>Rencana<br>Strategis | Tingkat<br>Kemajuan |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| (1) | (2)                     | (3)                                    | (4)                             | (5)                                  | (6) = 4/5*100       |
|     | Pembangunan<br>Industri | Industri yang<br>Ditetapkan dalam RPIK |                                 |                                      |                     |

Berdasarkan data diatas, sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri dengan indikator Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 106,86 dengan target akhir pada rencana strategis yaitu pada tahun 2026 sebesar 100% dengan tingkat kemajuan sebesar 106,86%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi tingkat Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri telah melebihi dari target yang ditetapkan pada akhir rencana strategis. Capaian ini mencerminkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sangat baik.

Selanjutnya untuk sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri dengan indikator Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK dilihat dari Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Perbandingan Capaian dengan Standar nasional/provinsi/kabupaten/kota**

| No  | Tujuan/ Sasaran                                      | Indikator Kinerja                                                             | Realisasi Tahun 2025 | Standar Provinsi | % Capaian     |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| (1) | (2)                                                  | (3)                                                                           | (4)                  | (5)              | (6) = 4/5*100 |
| 2   | Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK | 106.86               | -                | -             |

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten tapin Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, capaian kinerja Dinas Perindustrian untuk capaian sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri dengan indikator Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK sudah sangat baik, namun untuk sasaran ini belum dapat dibandingkan dengan capaian nasional/provinsi/kabupaten/kota. Hal ini disebabkan belum didapatnya data pembandingan atas capaian dimaksud. Dengan demikian data capaian ini diperlukan data perbandingan atas kinerja yang diperoleh dan sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan target, sekaligus dijadikan pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja lebih baik kedepannya.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri dengan indikator Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK yang telah dilakukan, disajikan dalam uraian sebagai berikut:

Keberhasilan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin terhadap sasaran Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri dengan indikator Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK ini didukung oleh beberapa program yang telah dilaksanakan dengan tepat untuk mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa program tersebut sebagai berikut:

d. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini dicapai dengan melakukan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.837.777.583,00 dan realisasi sebesar Rp.696.142.364,00 atau 83,09%.

e. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini dicapai dengan melakukan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.89.945.098,00 dan realisasi sebesar Rp.75.298.450,00 atau 83,71%.

f. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini dicapai dengan melakukan Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.119.789.934,00 dan realisasi sebesar Rp.107.441.635,00 atau 89,69%.

### 3.1.3 Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi.

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Koperasi dan UMKM dengan Indikator LPE Kategori Industri Pengolahan berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 42,86% dari target 55% dengan capaiannya sebesar 79,92% atau dengan kategori tinggi sebagaimana uraian berikut:

| No. | Sasaran Strategis                   | Indikator Kinerja                          | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| (1) | (2)                                 | (3)                                        | (4)    | (5)       | (6)       | (7)      |
| 3   | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat | 55,00  | 42,86     | 77,92     | Tinggi   |

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi dengan Indikator Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat dengan capaian kinerja dibawah dari target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin masih belum tercapai kategori capaian Tinggi.

Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi dengan diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator | Meta Indikator |
|-----|-------------------|-----------|----------------|
| (1) | (2)               | (3)       | (4)            |

|   |                                     |                                            |                                                                                                     |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat | $\frac{\sum \text{Koperasi Sehat yang SHU nya Meningkat}}{\sum \text{Koperasi Sehat}} \times 100\%$ |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Perhitungan capaian sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi dengan Indikator Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Pada tahun 2025, koperasi yang SHU nya meningkat tercatat sebanyak 6 (enam) koperasi dari 14 koperasi aktif yang dikategorikan sehat atau yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berikut adalah daftar 6 (enam) koperasi yang SHU nya meningkat pada tahun 2025:

**Tabel 3.8**  
**Daftar Koperasi yang Sisa Hasil Usaha (SHU) nya Meningkat**

| <u>No</u> | <u>NAMA KOPERASI</u>                    | <u>TANGGAL RAT</u> | <u>SISA HASIL USAHA</u> |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1         | KPN ARWANA                              | 20 Februari 2025   | Rp. 13.566.136          |
| 2         | KOPERASI PRODUSEN KELADAN MITRA USAHA   | 20 Maret 2025      | Rp. 2.282.581.036       |
| 3         | KOPERASI KARYAWAN TIRTA BASTARI         | 20 Maret 2025      | Rp. 73.643.370          |
| 4         | KUD RAHMAT                              | 23 Maret 2025      | Rp. 297.525             |
| 5         | PRIMKOPPOL RESOR TAPIN                  | 22 April 2025      | Rp. 161.245.000         |
| 6         | KOPERASI KONSUMEN KHARISMA ALAM PERSADA | 15 Oktober 2025    | Rp. 127.082.304         |

Sumber: diolah, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2026

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi dengan Indikator Persentase Koperasi yang SHUnya Meningkat pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya**

| No  | Tujuan/<br>Sasaran                  | Indikator<br>Kinerja                       | Tahun<br>(2022) | Tahun<br>(2023) | Tahun<br>(2024) | Tahun (2025) |           |              |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
|     |                                     |                                            | Realiasi        | Realisasi       | Realisasi       | Target       | Realisasi | %<br>Capaian |
| (1) | (2)                                 | (3)                                        | (4)             | (5)             | (6)             | (7)          | (8)       | (9)          |
| 3   | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat | -               | -               | 53              | 55           | 42.86     | 77,93        |

Capaian sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi sebagaimana tabel diatas dapat dilihat pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2024 sebesar 53% dan pada tahun 2025 turun menjadi 42,86% yang dalam hal ini dapat terlihat bahwa pencapaian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mengalami penurunan atas capaian yang diperoleh.

Selanjutnya sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi jika dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| No. | Tujuan/<br>Sasaran                  | Indikator Kinerja                          | Realisasi Kinerja<br>Tahun 2025 | Target Akhir<br>Rencana<br>Strategis | Tingkat<br>Kemajuan |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| (1) | (2)                                 | (3)                                        | (4)                             | (5)                                  | (6)<br>=4/5*100     |
| 3   | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat | 42.86                           | 62.50                                | 68,58               |

Berdasarkan data diatas, untuk sasaran Meningkatkan Produktivitas Koperasi realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 42,86% dibandingkan dengan target akhir pada rencana strategis yaitu pada tahun 2026 sebesar 62,50 dengan tingkat kemajuan sebesar 68,58%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi terhadap tingkat Produktivitas Koperasi masih jauh dari target yang ditetapkan pada akhir rencana strategis. Capaian ini mencerminkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin masih perlu ditingkatkan.

Selanjutnya untuk sasaran Meningkatkan Produktivitas Koperasi dilihat dari Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.12 Perbandingan Capaian dengan Standar nasional/provinsi/kabupaten/kota**

| No  | Tujuan/ Sasaran                     | Indikator Kinerja                          | Realisasi Tahun 2025 | Standar Provinsi | % Capaian    |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| (1) | (2)                                 | (3)                                        | (4)                  | (5)              | (6) =4/5*100 |
| 3   | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat | 42.86                | -                | -            |

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten tapin Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, capaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten tapin untuk capaian Meningkatkan Produktivitas Koperasi dengan indikator Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat belum dapat mencapai target yang ditetapkan, dan untuk sasaran ini belum memperoleh data untuk dibandingkan dengan data capaian nasional/provinsi/kabupaten/kota.

Hal ini disebabkan belum didapatnya data pembanding atas capaian dimaksud. Dengan demikian data capaian ini diperlukan data perbandingan atas kinerja yang diperoleh dan sekaligus dijadikan bahan evaluasi untuk menetapkan target, sekaligus dijadikan pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja lebih baik kedepannya.

Kegagalan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin terhadap Meningkatkan Produktivitas Koperasi dengan indikator Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Menurunnya kondisi perekonomian global;
- b. Berkurangnya program kegiatan untuk melakukan pembinaan disebabkan adanya pengurangan anggaran;
- c. Kurangnya SDM yang menangani koperasi.

### 3.1.4 Sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 14,62% dari target 14,62% atau dengan capaiannya sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi sebagaimana uraian berikut:

| No. | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                               | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori      |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| (1) | (2)                                    | (3)                                             | (4)    | (5)       | (6)       | (7)           |
| 4   | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro | Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan | 14.62  | 14.62     | 100,00    | Sangat Tinggi |

Berdasarkan data diatas, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan mendapatkan capaian kinerja sesuai dari target yang ditetapkan yaitu 100%, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin memperoleh kategori capaian Sangat Tinggi.

Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada Sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis          | Indikator                    | Meta Indikator |
|-----|----------------------------|------------------------------|----------------|
| (1) | (2)                        | (3)                          | (4)            |
| 1-3 | Meningkatnya Produktivitas | Persentase Peningkatan Omzet |                |

|  |                    |                    |                                                                                                                  |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Usaha Mikro Binaan | Usaha Mikro Binaan | $\frac{\sum \text{Omzet Usaha Mikro Setelah Dibina}}{\sum \text{Omzet Usaha Mikro Sebelum Dibina}} \times 100\%$ |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya**

| No  | Tujuan/<br>Sasaran                     | Indikator<br>Kinerja                            | Tahun<br>(2022) | Tahun<br>(2023) | Tahun<br>(2024) | Tahun (2025) |           |              |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
|     |                                        |                                                 | Realiasi        | Realisasi       | Realisasi       | Target       | Realisasi | %<br>Capaian |
| (1) | (2)                                    | (3)                                             | (4)             | (5)             | (6)             | (7)          | (8)       | (9)          |
| 4   | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro | Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan | -               | -               | 17,13           | 14.62        | 14.62     | 100,00       |

Capaian sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro sebagaimana tabel diatas dapat dilihat pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2024 sebesar 17,13% dan pada tahun 2025 menjadi 14,62% yang dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mengalami penurunan atas pencapaian target yang ditetapkan.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian periode 2025-2029 untuk capaian sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.14 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| No. | Tujuan/<br>Sasaran                           | Indikator Kinerja                                        | Realisasi Kinerja<br>Tahun 2025 | Target Akhir<br>Rencana Strategis | Tingkat<br>Kemajuan |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| (1) | (2)                                          | (3)                                                      | (4)                             | (5)                               | (6) = 4/5*100       |
| 4   | Meningkatnya<br>Produktivitas Usaha<br>Mikro | Persentase<br>Peningkatan Omzet<br>Usaha<br>Mikro Binaan | 14.62                           | 15.40                             | 94,94               |

Berdasarkan data diatas, sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 14,62% dengan target akhir pada rencana strategis yaitu pada tahun 2026 sebesar 15,40%% dengan tingkat kemajuan sebesar 94,94%%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi tingkat Pencapaian sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro hampir mencapai dari target yang ditetapkan pada akhir rencana strategis. Capaian ini mencerminkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin cukup baik.

Selanjutnya untuk sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro dilihat dari Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.15 Perbandingan Capaian dengan Standar nasional/provinsi/kabupaten/kota**

| No  | Tujuan/ Sasaran                        | Indikator Kinerja                               | Realisasi Tahun 2025 | Standar Provinsi | % Capaian     |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| (1) | (2)                                    | (3)                                             | (4)                  | (5)              | (6) = 4/5*100 |
| 4   | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro | Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan | 14.62                | -                | -             |

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten tapin Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, capaian kinerja Dinas Perindustrian untuk sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan sudah sangat baik, namun untuk sasaran ini belum dapat

dibandingkan dengan capaian nasional/provinsi/kabupaten/kota. Hal ini disebabkan belum didapatnya data pembandingan atas capaian dimaksud. Dengan demikian data capaian ini diperlukan data perbandingan atas kinerja yang diperoleh dan sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan target, sekaligus dijadikan pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja lebih baik kedepannya.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan yang telah dilakukan, disajikan dalam uraian sebagai berikut:

Keberhasilan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin terhadap sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Binaan ini didukung oleh beberapa program yang tepat dan terialisasi dengan baik pada tahun 2025.

### 3.1.5 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi skor nilai sebesar 78,35 dari target skor nilai 84 atau dengan capaian sebesar 93,27% dengan kategori sangat tinggi sebagaimana uraian berikut:

| No. | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja            | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori      |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                          | (4)    | (5)       | (6)       | (7)           |
| 5   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 84,00  | 78.35     | 93,27     | Sangat Tinggi |

Sumber data: LHI AKIP Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2025

Berdasarkan data diatas, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mendapatkan realisasi skor nilai sebesar 78,35

dari target yang ditetapkan dengan skor nilai sebesar 84 dengan capaian sebesar 93,27%, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin memperoleh kategori capaian Sangat Tinggi.

Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis                                   | Indikator                    | Meta Indikator                             |       |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                          | (4)                                        |       |
| 1-4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |                                            |       |
|     |                                                     |                              | Komponen Yang Dinilai                      | Bobot |
|     |                                                     |                              | 1. Perencanaan Kinerja                     | 30    |
|     |                                                     |                              | 2. Pengukuran Kinerja                      | 30    |
|     |                                                     |                              | 3. Pelaporan Kinerja                       | 15    |
|     |                                                     |                              | 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25    |

Berikut realisasi kinerja sasaran sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya**

| No  | Tujuan/<br>Sasaran                                  | Indikator<br>Kinerja         | Tahun<br>(2022) | Tahun<br>(2023) | Tahun<br>(2024) | Tahun (2025) |           |              |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
|     |                                                     |                              | Realiasi        | Realisasi       | Realisasi       | Target       | Realisasi | %<br>Capaian |
| (1) | (2)                                                 | (3)                          | (4)             | (5)             | (6)             | (7)          | (8)       | (9)          |
| 5   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | -               | 55,15           | 78,35           | 84,00        | 78.35     | 93,27        |

Capaian sasaran sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel diatas dapat dilihat pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan, pada 2023 dengan skor nilai sebesar 55,15 tahun 2024 memperoleh skor nilai sebesar 78,35 dan pada tahun 2025 memperoleh skor nilai menjadi 78,35 yang dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mengalami peningkatan atas pencapaian target yang ditetapkan.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian periode 2025-2029 untuk capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.17 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| No. | Tujuan/<br>Sasaran                                        | Indikator Kinerja               | Realisasi Kinerja<br>Tahun 2025 | Target Akhir<br>Rencana Strategis | Tingkat<br>Kemajuan |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| (1) | (2)                                                       | (3)                             | (4)                             | (5)                               | (6) =4/5*100        |
| 5   | Meningkatnya<br>Akuntabilitas Kinerja<br>Perangkat Daerah | Nilai SAKIP<br>Perangkat Daerah | 78.35                           | 84.20                             | 93,05               |

Berdasarkan data diatas, untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan skor nilai sebesar 78,35 dari target akhir pada rencana strategis yaitu pada tahun 2026 dengan skor nilai sebesar 84,20 dengan tingkat kemajuan sebesar 93,05%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi tingkat Pencapaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah hampir mencapai dari target yang ditetapkan pada akhir rencana strategis. Capaian ini mencerminkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin cukup baik.

Selanjutnya untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilihat dari Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.18 Perbandingan Capaian dengan Standar nasional/provinsi/kabupaten/kota**

| No  | Tujuan/ Sasaran                                     | Indikator Kinerja            | Realisasi Tahun 2025 | Standar Provinsi | % Capaian    |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                          | (4)                  | (5)              | (6) =4/5*100 |
| 5   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 78.35                | 82,96            | 94,44        |

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten tapin Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, capaian kinerja Dinas Perindustrian untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sudah cukup baik, namun untuk sasaran ini belum dapat dibandingkan dengan capaian nasional/provinsi/kabupaten/kota. Hal ini disebabkan belum didapatnya data pembandingan atas capaian dimaksud. Dengan demikian data capaian ini diperlukan data perbandingan atas kinerja yang diperoleh dan sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan target, sekaligus dijadikan pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja lebih baik kedepannya.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan, disajikan dalam uraian sebagai berikut:

Keberhasilan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin terhadap sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini didukung oleh beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala setiap triwulan;
2. Pemanfaatan aplikasi E-SAKIP NG dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja;
3. Adanya dukungan baik dalam bentuk pembinaan maupun pendampingan baik dari Bagian Organisasi, Bapelitbang, dan Inspektorat dalam penyusunan dokumen SAKIP.

Adapun faktor penghambat terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih terbatas pada implementasi SAKIP;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) belum tertib dalam pengumpulan dan penyampaian data dari ketepatan waktu pengumpulan maupun kelengkapan dokumen pendukung sehingga berdampak pada kualitas penyusunan laporan SAKIP;
3. Pemanfaatan aplikasi yang belum optimal.

Solusi untuk dapat meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin kedepannya adalah:

1. Menindaklanjuti setiap rekomendasi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;
2. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada seluruh ASN secara berkala terkait implementasi SAKIP;
3. Memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam penginputan pada aplikasi;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

### 3.1.6 Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 87,71 dari target 80 atau dengan capaiannya sebesar 109,63 dengan kategori sangat tinggi sebagaimana uraian berikut:

| No. | Sasaran Strategis                                 | Indikator Kinerja                                    | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori      | Sumber Data                                    |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                               | (3)                                                  | (4)    | (5)       | (6)       | (7)           | (8)                                            |
| 6   | Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah | 80     | 87,71     | 109,63    | Sangat Tinggi | Padaringan Kabupaten Tapin dan My ASN (BKPSDM) |

Berdasarkan data diatas, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) mendapatkan capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin memperoleh kategori capaian Sangat Tinggi.

Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

| No. | Sasaran Strategis                                 | Indikator                                            | Meta Indikator                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                               | (3)                                                  | (4)                                                                                                |
| 6   | Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah | Diukur berdasarkan angka rata-rata dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN. |

Perhitungan capaian sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) diperoleh dari hasil perhitungan yang ditarik hasil dari Sistem BKN.

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya**

| No  | Tujuan/<br>Sasaran | Indikator<br>Kinerja | Tahun<br>(2022) | Tahun<br>(2023) | Tahun<br>(2024) | Tahun (2025) |           |              |
|-----|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
|     |                    |                      | Realiasi        | Realisasi       | Realisasi       | Target       | Realisasi | %<br>Capaian |
| (1) | (2)                | (3)                  | (4)             | (5)             | (6)             | (7)          | (8)       | (9)          |
| 6   | Meningkat          | Indeks               | -               | -               | 27              | 80           | 87,17     | 97,17        |

| No  | Tujuan/<br>Sasaran                                    | Indikator<br>Kinerja                                   | Tahun<br>(2022) | Tahun<br>(2023) | Tahun<br>(2024) | Tahun (2025) |           |              |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
|     |                                                       |                                                        | Realiasi        | Realisasi       | Realisasi       | Target       | Realisasi | %<br>Capaian |
| (1) | (2)                                                   | (3)                                                    | (4)             | (5)             | (6)             | (7)          | (8)       | (9)          |
|     | nya<br>Profesional<br>isme ASN<br>Perangkat<br>Daerah | Profesionalisme<br>ASN (IP-ASN)<br>Perangkat<br>Daerah |                 |                 |                 |              |           |              |
|     |                                                       |                                                        |                 |                 |                 |              |           |              |

Capaian sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) sebagaimana tabel diatas dapat dilihat pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2024 sebesar 27,00% dan pada tahun 2025 menjadi 87,17% yang dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian periode 2025-2029 untuk capaian sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.20 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| No. | Tujuan/<br>Sasaran                                      | Indikator Kinerja                                             | Realisasi Kinerja<br>Tahun 2025 | Target Akhir<br>Rencana Strategis | Tingkat<br>Kemajuan |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| (1) | (2)                                                     | (3)                                                           | (4)                             | (5)                               | (6) =4/5*100        |
| 6   | Meningkatnya<br>Profesionalisme ASN<br>Perangkat Daerah | Indeks<br>Profesionalisme<br>ASN (IP-ASN)<br>Perangkat Daerah | 87,17                           | 80.40                             | 108,42              |

Berdasarkan data diatas, sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 87,17% dengan target akhir pada rencana strategis yaitu pada tahun 2026 sebesar 80,40% dengan tingkat kemajuan sebesar 108,42%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi tingkat Pencapaian sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah melebihi dari target yang ditetapkan pada akhir rencana strategis. Capaian ini mencerminkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sangat baik.

Selanjutnya untuk sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) dilihat dari Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.21 Perbandingan Capaian dengan Standar nasional/provinsi/kabupaten/kota**

| No  | Tujuan/ Sasaran                                   | Indikator Kinerja                                    | Realisasi Tahun 2025 | Standar Provinsi | % Capaian    |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| (1) | (2)                                               | (3)                                                  | (4)                  | (5)              | (6) =4/5*100 |
| 6   | Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah | 87,17                | -                | -            |

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten tapin Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, capaian kinerja Dinas Perindustrian untuk sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) sudah tercapai sangat baik, namun untuk sasaran ini belum dapat dibandingkan dengan capaian nasional/provinsi/kabupaten/kota. Hal ini disebabkan belum didapatnya data pembanding atas capaian dimaksud. Dengan demikian data capaian ini diperlukan data perbandingan atas kinerja yang diperoleh

dan sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan target, sekaligus dijadikan pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja lebih baik kedepannya.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan dalam uraian faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Adapun faktor pendukung terhadap keberhasilan Sasaran Menigkatnya Profesionalisme ASN Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelatihan teknis bagi ASN Badan Pendapatan Daerah melalui bimtek maupun diklat untuk meningkatkan kompetensi ASN;
2. Memberikan kesempatan kepada ASN untuk meningkatkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Berikut adalah hasil rekapitulasi IP-ASN dari seluruh ASN Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada tahun 2025 yang diambil dari MyASN BKN:

**Gambar 1.4**  
**Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)**  
**Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025**

| IP-ASN              |                                                        |              |            |         |          |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|----------|--------|
| Dinas Perindustrian |                                                        |              |            |         |          |        |
| Ditemukan 21 Data   |                                                        |              |            |         |          |        |
| No                  | Nama/NIP                                               | Skor Dimensi |            |         |          | IP-ASN |
|                     |                                                        | Kualifikasi  | Kompetensi | Kinerja | Disiplin |        |
| 1                   | H. YUSTAN AZIDIN, ST.MT<br>196901101996031005          | 20,0         | 25,0       | 1,0     | 5,0      | 51,0   |
| 2                   | Hj Nurul Kamariah, S.Sos<br>196803131996032004         | 15,0         | 10,0       | 1,0     | 5,0      | 31,0   |
| 3                   | LENNY LIESTIASARI, ST<br>197702222009042002            | 15,0         | 0,0        | 1,0     | 5,0      | 21,0   |
| 4                   | Henny Herlena, S.Pd.MA<br>197011271999032006           | 20,0         | 10,0       | 1,0     | 5,0      | 36,0   |
| 5                   | Ervan Ariajaya, ST<br>198005122009041006               | 15,0         | 0,0        | 1,0     | 5,0      | 21,0   |
| 6                   | Aryati Lasmi Sari, S.Pi., S.Pd<br>197210142007012017   | 15,0         | 25,0       | 1,0     | 5,0      | 46,0   |
| 7                   | BAYU FIRDAUS AGUSTYANNOOR, S.STP<br>199508312017081001 | 15,0         | 25,0       | 1,0     | 5,0      | 46,0   |
| 8                   | Marliani, SE<br>198707022011012013                     | 15,0         | 0,0        | 1,0     | 5,0      | 21,0   |
| 9                   | Luthfi Masychon Sofwan, ST<br>197805112005011012       | 15,0         | 25,0       | 1,0     | 3,0      | 44,0   |
| 10                  | Milyani, S.Pt<br>196907011969072001                    | 15,0         | 0,0        | 1,0     | 3,0      | 19,0   |

| IP-ASN                        |                                                 |      |      |     |     |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----|-----|------|
| 10                            | Milyani, S.Pt<br>196907031990022001             | 15,0 | 0,0  | 1,0 | 3,0 | 19,0 |
| 11                            | MUHAMMAD NURDIN, S. Sos<br>197806052010011019   | 15,0 | 0,0  | 1,0 | 5,0 | 21,0 |
| 12                            | Dahlia, SP<br>198206212007012007                | 20,0 | 0,0  | 1,0 | 5,0 | 26,0 |
| 13                            | ZULKAIDA FATMARISA, ST<br>199006092024212011    | 0,0  | 0,0  | 1,0 | 5,0 | 6,0  |
| 14                            | ALBERT HOSEA, S.T<br>199306112020121005         | 15,0 | 17,5 | 1,0 | 5,0 | 38,5 |
| 15                            | ADAM RASIDI, S.E<br>199609192020121008          | 15,0 | 0,0  | 1,0 | 5,0 | 21,0 |
| 16                            | NURYANI, ST<br>198607192020122001               | 15,0 | 0,0  | 1,0 | 5,0 | 21,0 |
| 17                            | AGUSTINAWATI, S.Pd<br>198208082009042004        | 0,0  | 0,0  | 1,0 | 5,0 | 6,0  |
| 18                            | HIDAYATURRAHMAN, A.Md<br>199606012024211002     | 0,0  | 13,0 | 1,0 | 5,0 | 19,0 |
| 19                            | YULIA DAMAYANTI, A.Md.Kom<br>199807282020122002 | 10,0 | 17,5 | 1,0 | 5,0 | 33,5 |
| 20                            | Sigit Pancahardjo<br>196705311990031003         | 5,0  | 17,5 | 1,0 | 5,0 | 28,5 |
| 21                            | Wahidah<br>196801231989032006                   | 5,0  | 0,0  | 1,0 | 5,0 | 11,0 |
| IP-ASN<br>Dinas Perindustrian |                                                 | 12,4 | 8,8  | 1,0 | 4,8 | 27,0 |



**Nama:**  
IP-ASN  
**Versi:**  
1.0  
**Deskripsi:**  
Aplikasi Indeks Profesionalitas ASN  
**Data:**  
Kepegawalan  
**Otoritas:**  
Admin Dinas Perindustrian  
**Akses:**  
28.082 kali

Sumber: Padaringan Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil dari Padaringan dan perhitungan akumulatif nilai dari semua ASN Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin memperoleh nilai IP-ASN sebesar 78,17 yang mana masih dalam kategori Sangat Tinggi. Walaupun masih banyak ASN yang belum memahami dan menguasai aplikasi berkenaan dengan IP-ASN.

### 3.2 Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran efisiensi anggaran dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\% \text{ Efisiensi anggaran} = \frac{(\text{Target Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Dengan rumus efisiensi anggaran di atas, diperoleh persentase efisiensi anggaran adalah sebagai berikut:

$$\frac{(Rp. 9.338.228.859 - Rp. 8.362.564.318)}{Rp. 9.338.228.859} \times 100\% = 10,45\%$$

**Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran**

| No       | Program / Kegiatan                                                                                                                                       | Anggaran                   | Realisasi                  | % Capaian     | Tingkat Efisiensi |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| (1)      | (2)                                                                                                                                                      | (3)                        | (4)                        | (5)           | (6)               |
| <b>1</b> | <b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>                                                                                                       | <b>Rp. 27.809.310,-</b>    | <b>Rp. 24.746.000,-</b>    | <b>88,98%</b> | <b>11,01%</b>     |
|          | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 27.809.310,-           | Rp. 24.746.000,-           | 88,98%        | 11,01%            |
| <b>2</b> | <b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>                                                                                                      | <b>Rp. 116.343.810,-</b>   | <b>Rp. 110.826.000,-</b>   | <b>95,26%</b> | <b>4,74%</b>      |
|          | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                         | Rp. 116.343.810,-          | Rp. 110.826.000,-          | 95,26%        | 4,74%             |
| <b>3</b> | <b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>                                                                                                    | <b>Rp. 47.009.310,-</b>    | <b>Rp. 42.296.000,-</b>    | <b>89,97%</b> | <b>10,03%</b>     |
|          | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Rp. 47.009.310,-           | Rp. 42.296.000,-           | 89,97%        | 10,03%            |
| <b>4</b> | <b>Program Pengembangan UMKM</b>                                                                                                                         | <b>Rp. 389.203.550,-</b>   | <b>Rp. 350.189.400,-</b>   | <b>89,98%</b> | <b>10,02%</b>     |
|          | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                           | Rp. 389.203.550,-          | Rp. 350.189.400,-          | 89,98%        | 10,02%            |
| <b>5</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                       | <b>Rp. 6.832.169.833,-</b> | <b>Rp. 6.218.485.390,-</b> | <b>91,02%</b> | <b>8,98%</b>      |
|          | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                | Rp. 6.276.800,-            | Rp. 3.713.600,-            | 59,16%        | 40,84%            |
|          | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                          | Rp. 3.311.563.971,-        | Rp. 3.173.653.906,-        | 95,84%        | 4,16%             |
|          | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                              | Rp. 2.499.890.340,-        | Rp. 2.322.320.722,-        | 92,90%        | 7,10%             |
|          | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                | Rp. 653.123.100,-          | Rp. 381.960.086,-          | 58,48%        | 41,52%            |
|          | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                            | Rp. 310.449.556,-          | Rp. 291.925.728,-          | 94,03%        | 5,97%             |
|          | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           | Rp. 50.866.066,-           | Rp. 44.911.348,-           | 88,29%        | 11,71%            |
| <b>6</b> | <b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>                                                                                                      | <b>Rp. 1.583.109.772,-</b> | <b>Rp. 1.298.927.689,-</b> | <b>82,05%</b> | <b>17,95%</b>     |
|          | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                             | Rp. 1.583.109.772,-        | Rp. 1.298.927.689,-        | 82,05%        | 17,95%            |
| <b>7</b> | <b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>                                                                                                          | <b>Rp. 180.589.628,-</b>   | <b>Rp. 163.886.233,-</b>   | <b>90,75%</b> | <b>9,25%</b>      |

|              |                                                                                                                                                                                              |                           |                           |               |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
|              | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp. 180.589.628,-         | Rp. 163.886.233,-         | 90,75%        | 9,25%         |
| 8            | <b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>                                                                                                                                | <b>Rp. 161.993.646,-</b>  | <b>Rp. 153.207.606,-</b>  | <b>94,58%</b> | <b>5,42%</b>  |
|              | Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | Rp. 161.993.646,-         | Rp. 153.207.606,-         | 94,58%        | 5,42%         |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                                              | <b>Rp.9.338.228.859,-</b> | <b>Rp.8.362.564.318,-</b> | <b>89,55%</b> | <b>10,45%</b> |

Sumber: diolah, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program/kegiatan sebesar **Rp.8.362.564.318,00** dari pagu anggaran sebesar **Rp.9.338.228.859,00** atau sebesar **89,55%** dengan nilai efisiensi sebesar **Rp.975.664.541,00** atau dengan tingkat efisiensi sebesar **10,45%**

Adapun efisiensi tersebut bersumber dari:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Pada program ini terdapat efisiensi dalam kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp27.809.310,- dengan realisasi sebesar Rp24.746.000,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 11,01%.

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;

Pada program ini terdapat efisiensi dalam Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp116.343.810,- dengan realisasi sebesar Rp110.826.000,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 4,74%.

3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

Pada program ini terdapat efisiensi dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya

dianggarkan sebesar Rp47.009.310,- dengan realisasi sebesar Rp42.296.000,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 10,03%.

#### 4. Program Pengembangan UMKM;

Pada program ini terdapat efisiensi dalam Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp389.203.550,- dengan realisasi sebesar Rp350.189.400,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 10,02%.

#### 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Pada program ini terdapat efisiensi dalam:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp6.276.800,- dengan realisasi sebesar Rp3.713.600,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 40,84%.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp3.311.563.971,- dengan realisasi sebesar Rp3.173.653.906,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 4,16%.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp2.499.890.340,- dengan realisasi sebesar Rp2.322.320.722,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 7,10%.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp653.123.100,- dengan realisasi sebesar Rp381.960.086, sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 41,52%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp310.449.556,- dengan realisasi sebesar Rp291.925.728,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 5,97%.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp50.866.066,- dengan realisasi

sebesar Rp44.911.348,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 11,71%.

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;

Pada program ini terdapat efisiensi dalam Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp1.583.109.772,- dengan realisasi sebesar Rp1.298.927.689,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 17,95%.

7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;

Pada program ini terdapat efisiensi dalam Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp180.589.628,- dengan realisasi sebesar Rp163.886.233,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 9,25%.

8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Pada program ini terdapat efisiensi dalam Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp161.993.646,- dengan realisasi sebesar Rp153.207.606,- sehingga masih terdapat sisa anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 5,42%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perindustrian Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin memiliki 5 (lima) sasaran strategis dengan semua sasaran strategis tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah masih rendahnya komitmen dan kesadaran ASN terhadap standar profesionalisme, masih belum adanya sistem pembinaan ASN yang sistematis dan berkelanjutan, masih belum adanya penerapan *reward and punishment*, serta masih belum adanya sosialisasi dan pembinaan kepegawaian untuk peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN melalui aplikasi Padaringan Kabupaten Tapin.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan yang perlu dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola dan manajemen kinerja, dengan meningkatkan efektivitas sistem pemantauan dan evaluasi kinerja guna memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai rencana.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan melakukan inovasi dalam layanan publik agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Efisiensi dan optimalisasi anggaran, dengan melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran guna memastikan efektivitas pembiayaan program dan kegiatan.

4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, dengan mendorong budaya kerja yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil.
5. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rantau, 13 Februari Tahun 2026

  
**Kepala Dinas**  
**Herliwansyah, S.E.,M.M.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 198001102008031002

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



#### PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN

#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Hj. Nurul Kamariah, S.Sos

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. Yamani, S.Ak, MM

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 06 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  
BUPATI TAPIN  
  
H. Yamani, S.Ak, MM

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN TAPIN  
  
Hj. Nurul Kamariah, S.Sos  
NIP. 196803131996032004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

| No. | Kinerja Utama                                        | Indikator Kinerja                                                             | Target |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                    | 3                                                                             | 4      |
| 1   | Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri yang Ditetapkan dalam RPIK | 100%   |
| 2   | Meningkatnya Produktivitas Koperasi                  | Persentase Koperasi yang Sisa Hasil Usaha (SHU) nya Meningkat                 | 55%    |
| 3   | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro               | Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro                                      | 14,62% |
| 3   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                  | 84,00  |
| 4   | Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah    | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah                          | 80     |

| No. | Program                                                     | Anggaran          |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.542.039.225 |
| 2.  | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                 | Rp. 42.652.620    |
| 3.  | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                | Rp. 45.766.620    |
| 4.  | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi              | Rp. 59.765.120    |
| 5.  | Program Pengembangan UMKM                                   | Rp. 122.726.430   |
| 6.  | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                | Rp. 837.777.583   |
| 7.  | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                    | Rp. 89.945.098    |
| 8.  | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional      | Rp. 119.789.934   |

Rantau, 06 Oktober 2025

Pihak Kedua,

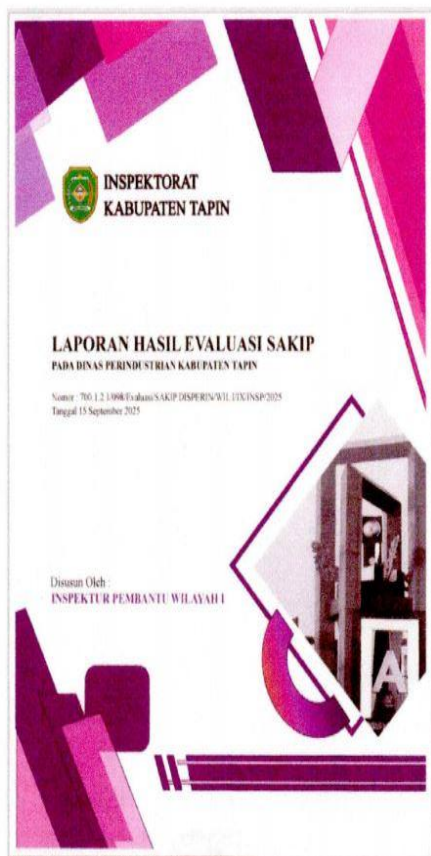
  
**H. Yamani, S.Ak, MM**

Pihak Pertama,

  
**H. Nurul Kamariah, S.Sos**  
 NIP. 196803131996032004

### Lampiran 3 LHE SAKIP Dinas Perindustrian

#### LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024



| No.                                  | Komponen yang Dinilai                   | Bobot      | Nilai 2023   | Nilai 2024   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 1.                                   | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 22,50        | 24,60        |
| 2.                                   | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 18,90        | 22,20        |
| 3.                                   | Pelaporan Kinerja                       | 15         | 11,25        | 12,30        |
| 4.                                   | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 2,50         | 19,25        |
| <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>   |                                         | <b>100</b> | <b>55,15</b> | <b>78,35</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |                                         |            | <b>CC</b>    | <b>BB</b>    |

#### REKOMENDASI

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dan jajarannya untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
  - 1) Menurunkan Indikator Pengukuran dan Evaluasi pada sasaran meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Sekretaris ke level di bawahnya;
  - 2) Membuat rencana aksi yang menggambarkan upaya untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan.
2. Pengukuran Kinerja
  - 1) Membuat data capaian kinerja dari setiap level organisasi yang dikumpulkan pada saat monitoring dan evaluasi berkala yang ditargetkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja;
  - 2) Meningkatkan kualitas pengukuran dan memanfaatkan hasil monitoring capaian kinerja untuk dijadikan penentuan strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.

## Lampiran 4 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024 (Jika ada)



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN**  
 Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146 Kode Pos 71111  
**R A N T A U**

### TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor: 700.1.2.1/098/Evaluasi/SAKIP DISPERIN/WIL.I/IX/INSP/2025 tanggal 15 September 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin, maka dengan ini kami Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:

| No. | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <p>Perencanaan Kinerja :</p> <p>1. Menurunkan Indikator Pengukuran dan Evaluasi pada sasaran meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Sekretaris ke level dibawahnya.</p> <p>2. Membuat rencana aksi yang menggambarkan upaya untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan.</p>             | <p>Perencanaan Kinerja :</p> <p>1. Telah menurunkan Indikator Pengukuran dan Evaluasi pada sasaran meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Sekretaris ke level dibawahnya.</p> <p>2. Telah membuat rencana aksi yang menggambarkan upaya untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan.</p> |
| 2.  | <p>Pengukuran Kinerja :</p> <p>1. Membuat data capaian kinerja dari setiap level organisasi yang dikumpulkan pada saat monitoring dan evaluasi berkala yang ditargetkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pengukuran dan memanfaatkan hasil monitoring capaian</p> | <p>Pengukuran Kinerja :</p> <p>1. Telah membuat data capaian kinerja dari setiap level organisasi yang dikumpulkan pada saat monitoring dan evaluasi berkala yang ditargetkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.</p> <p>2. Telah meningkatkan kualitas pengukuran dan memanfaatkan</p>              |

|                                                                                             |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kinerja untuk dijadikan penentuan strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja. | hasil monitoring capaian kinerja untuk dijadikan penentuan strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mengetahui,  
 Plt. Kepala Dinas Perindustrian,

  
**Hi. Nurul Kamariah, S. Sos**  
 Pembina Tk. I/ IVb  
 NIP. 19680313 199603 2 004